

**PELAKSANAAN STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN OLEH
PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEGIATAN
USAHA KECIL MENENGAH
(STUDI DI KABUPATEN PANGANDARAN)**

Nina Gartina ¹, Regi Refian Garis ², Neti Sunarti ³
Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia¹⁾²⁾³⁾

Email : regirefiangaris@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pembinaan Pemerintah Desa melalui pemberdayaan perempuan terhadap sektor usaha kecil menengah di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 9 bulan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 10 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan oleh Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan kegiatan usaha kecil menengah di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran telah berjalan dengan optimal. Adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya kesadaran, keinginan, dan kualitas kaum perempuan sebagai pelaku usaha kecil menengah dalam meningkatkan usaha kecil menengah, serta belum ada musyawarah dan kajian mendalam terkait peraturan yang mengacu pada hak-hak sosial kaum perempuan supaya tidak terjadi eksploitasi dalam proses pengembangan usaha kecil menengah. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan motivasi berupa sosialisasi, memberikan bimbingan berupa pelatihan maupun pembinaan supaya dapat meningkatkan usaha kecil menengah, serta melakukan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemeintah Desa untuk merumuskan aturan yang berkaitan dengan hak-hak sosial kaum perempuan supaya tidak terjadi eksploitasi dalam proses pengembangan usaha kecil menengah.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Pemberdayaan, Usaha Kecil Menengah*

PENDAHULUAN

Pemberdayaan perempuan adalah gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai penggeraknya

bahagia, sejahtera, maju, dan mandiri. Maksud dan tujuan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga

meningkatkan kesejahteraan keluarga terwujudnya keluarga yang berbudaya,

bahagia, sejahtera, maju, mandiri, hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sumodiningrat (Riant Nugroho, 2011) mengemukakan bahwa untuk melakukan pemberdayaan perempuan perlu tiga langkah yang berkesinambungan, yaitu pemihakan, penyiapan dan perlindungan.

Yang menjadi permasalahan adalah kurangnya pembinaan Pemerintah Desa melalui pemberdayaan perempuan terhadap sektor usaha kecil menengah di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. Kurangnya partisipasi Pemerintah Desa dalam pemeliharaan usaha kecil menengah yang telah ada, sehingga kelompok usaha di bidang ekonomi yang telah dijalankan tidak berjalan lagi.
2. Rendahnya pendidikan kaum perempuan dan tidak memiliki keterampilan sehingga sulit mengembangkan Usaha Kecil Menengah.
3. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi sehingga dalam segi pemasarannya produk yang dihasilkan tidak terjual luas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan strategi pemberdayaan

perempuan oleh Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan kegiatan usaha kecil menengah di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran ?; 2) Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan oleh Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan kegiatan usaha kecil menengah di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran ?; 3) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan oleh Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan kegiatan usaha kecil menengah di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari Pemerintah Desa yang terdiri atas Perangkat Desa sebanyak 3 (tiga) orang, Pelaku Usaha Kecil Menengah sebanyak 2 (dua) orang, perempuan sebanyak 5 (lima) orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan/verifikasi.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Pelaksanaan

Menurut, Bintoro Tjokroadmudjoyo (Adisasmita, 2011:24) mengemukakan bahwa ‘pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek’.

Pengertian Pelaksanaan menurut Westra, dkk (Adisasmita, 2011 : 24) dikemukakan bahwa, ‘Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, dan kapan waktu dimulainya.’

2. Pengertian Pemberdayaan

Menurut Parsons (Anwas, 2014:49) menyatakan bahwa “Pemberdayaan adalah menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.”

Dalam konteks pemberdayaan bagi perempuan, menurut Nursahbani Katjasungkana dalam diskusi Tim Perumus Strategi Pembangunan Nasional (Riant Nugroho, 2011)

mengemukakan ada empat indikator pemberdayaan yaitu:

1. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif didalam lingkungan.
2. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam memberdayakan guna aset atau sumber daya yang terbatas tersebut.
3. Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut.
4. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara sama dan setara.

3. Pengertian Usaha Kecil Menengah

Menurut Keputusan Presiden RI No.99 tahun 1998 (Wilantara dan Susilawati, 2016:5) Usaha Kecil Menengah adalah “kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil yang perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Strategi Pemberdayaan Perempuan Oleh Pemerintah Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kegiatan Usaha Kecil Menengah di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Strategi Pemberdayaan Perempuan Oleh Pemerintah Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kegiatan Usaha Kecil Menengah di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pemungkinan

Pemungkinan merupakan penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat berkembang lebih jauh dalam bidang ekonomi, seperti kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) di desa Padaherang, maka dari itu Pemerintah Desa perlu menggali potensi, meningkatkan bidang pendidikan, serta meningkatkan keterampilan yang dimiliki masyarakat khususnya perempuan, tujuannya agar memungkinkan masyarakat untuk berkembang, sehingga dapat meningkatkan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Pemerintah Desa menggali potensi yang dimiliki masyarakat dalam proses pengembangan Usaha Kecil Menengah, masih kurang berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dari meskipun telah diadakannya pembinaan dan pengarahan kepada masyarakat khususnya kepada pelaku Usaha Kecil Menengah tetapi Usaha Kecil Menengah di desa padaherang tidak berkembang.

Pemerintah Desa meningkatkan unsur kultural dalam bidang pendidikan dalam meningkatkan Usaha Kecil Menengah, sudah cukup baik, hal ini

dapat terlihat dari dengan cara pemerintah desa telah melakukan pengarahan maupun pelatihan yang bertujuan mendidik agar masyarakat khususnya kaum perempuan bisa meningkatkan keahlian yang dimiliki agar mampu meningkatkan Usaha Kecil Menengah.

Pemerintah Desa mengarahkan masyarakat secara struktural sesuai keterampilan yang dimiliki, dapat diketahui bahwa meskipun sudah dilakukan beberapa cara dari Pemerintah Desa tapi respon dari para Pelaku Usahanya serta masyarakatnya kurang baik, maka dari itu Pemerintah Desa perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pengarahan maupun bimbingan agar dapat meningkatkan keterampilan yang dimiliki untuk dapat mengembangkan Usaha Kecil Menengah dengan baik.

b. Penguatan

Penguatan merupakan sebagai proses untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam mengelola kegiatan Usaha Kecil Menengah, sehingga dengan adanya kegiatan tersebut membuat masyarakat khususnya kaum perempuan di desa Padaherang semakin mandiri.

Pemerintah Desa tidak pernah menerapkan bidang teknologi dalam peningkatan Usaha Kecil Menengah, padahal teknologi merupakan faktor untuk berjalannya usaha terutama untuk memasarkan produknya.

Pemerintah Desa sangat mampu untuk mengarahkan dan memberikan

bimbingan-bimbingan agar dapat mampu memperkuat kemampuan yang dimiliki tujuannya guna dapat meningkatnya Usaha Kecil Menengah di desa padaherang. Jadi cara pemerintah untuk untuk memperkuat kemampuan yang dimiliki sudah dilakukan dengan cukup baik.

Pemerintah Desa melakukan arahan untuk menunjang kemandirian kepada kaum perempuan, dapat diketahui bahwa untuk menunjang kemandirian kurang optimal dalam melakukan arahan untuk menunjang kemandirian kepada kaum perempuan yaitu terlihat dari tidak ada ketidak lanjutan dari Pemerintah Desa untuk mengembangkan Usaha Kecil Menengah, padahal jika Usaha Kecil Menengah dapat berjalan dengan optimal itu dapat menunjang kemandirian kaum perempuan agar kaum perempuan sejahtera dan mandiri.

c. Perlindungan

perlindungan dari Pemerintah Desa sangat diperlukan sebagai bukti keberpihakan kepada masyarakat khususnya kaum perempuan di Desa Padaherang dengan membuat aturan terhadap kaum perempuan. Tindakan perlindungan ini, dapat menjadikan masyarakat khususnya kaum perempuan di desa Padaherang semakin berdaya dan sejahtera.

Pemerintah Desa telah memberikan perlindungan kepada kaum perempuan dengan adanya aturan tentang pemberdayaan perempuan, hal tersebut menunjukkan keberpihakan kepada

kaum perempuan, dimana dengan adanya Peraturan Desa tentang pemberdayaan perempuan dapat memberikan perlindungan dan mensejahterakan kaum perempuan di Desa Padaherang.

Pemerintah Desa tidak optimal dalam membuat aturan yang mengacu pada hak-hak sosial kaum perempuan supaya tidak terjadi eksploitasi, dikarenakan belum ada kajian mendalam dan belum ada musyawarah terkait peraturan tersebut. Padahal pengeksploitasi kepada kaum perempuan harus dihindari.

Pemerintah desa melakukan penghapusan jenis diskriminasi terhadap kaum perempuan, dapat diketahui sudah optimal dalam melakukan penghapusan jenis diskriminasi, hal ini dapat dilihat dari dengan cara adanya pengarahan kepada kaum perempuan dalam program-program yang di dukung dari pihak desa yaitu Usaha Kecil Menengah.

d. Penyokongan

Penyokongan berkaitan dengan memberikan bimbingan, pelatihan, dan dukungan agar mampu meningkatkan Usaha Kecil Menengah yang ada di Desa Padaherang, serta dapat mengatasi kendala yang terjadi dalam kegiatan Usaha Kecil Menengah.

Pemerintah Desa memberikan bimbingan keterampilan kepada kaum perempuan untuk meningkatkan Usaha Kecil Menengah, sudah cukup optimal dalam memberikan bimbingan keterampilan kepada kaum perempuan. Meskipun pelatihan dan pembinaan

sudah dilakukan tetapi respon dari masyarakat (perempuan) kurang baik maka dari itu pemerintah desa perlu meningkatkan partisipasi masyarakat (perempuan) serta pelaku Usaha Kecil Menengah dalam pelatihan dan pembinaan tentang Usaha Kecil Menengah agar dapat meningkatkan Usaha Kecil Menengah di desa padaherang

Pemerintah Desa memberikan motivasi kepada kaum perempuan, dapat diketahui pemberian motivasi kepada kaum perempuan maupun pelaku Usaha Kecil Menengah sudah optimal. Dapat dilihat dari adanya pengarahan maupun sosialisasi dari Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa menyokong dengan memberikan bantuan kepada pelaku Usaha Kecil Menengah, kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari meskipun telah diberikan bantuan dana kepada pelaku Usaha Kecil Menengah, tetapi tidak ada pelatihan mengenai manajemen sehingga pelaku Usaha Kecil Menengah tidak bisa mengatur keuangannya.

e. Pemeliharaan

Pemeliharaan dalam kegiatan Usaha Kecil Menengah merupakan proses menjaga berkelanjutan untuk memberdayakan perempuan di desa Padaherang. Terkait dengan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan Usaha Kecil Menengah, hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah situasi yang kondusif dan harus selalu terpelihara.

Pemerintah Desa menjamin keselarasan dan keseimbangan dalam

meningkatkan Usaha Kecil Menengah, kurang berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari meskipun telah dilakukan sosialisasi untuk mengembangkan Usaha Kecil Menengah, namun pemeliharaan dalam Usaha Kecil Menengah masih kurang efektif sehingga tidak mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan dalam Usaha Kecil Menengah yang ada.

Pemerintah Desa memelihara kondisi yang kondusif dalam pemeliharaan Usaha Kecil Menengah, kurang optimal, hal ini terlihat dari meskipun adanya pengarahan serta koordinasi dengan kelompok perempuan tetapi dalam pemeliharaan Usaha Kecil Menengah kurang kondusif.

Pemerintah Desa memberikan kesempatan berusaha kepada kaum perempuan, dapat diketahui sudah optimah, hal ini dapat terlihat dari diarahkannya kaum perempuan oleh Pemerintah Desa terhadap kegiatan Usaha Kecil Menengah yang ada di desa Padaherang.

1. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Strategi Pemberdayaan Perempuan Oleh Pemerintah Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kegiatan Usaha Kecil Menengah di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian tentang hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Strategi Pemberdayaan Perempuan Oleh Pemerintah Desa

Dalam Upaya Meningkatkan Kegiatan Usaha Kecil Menengah di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pemungkinan

Hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam menggali potensi yang dimiliki masyarakat dalam proses pengembangan Usaha Kecil Menengah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap potensi yang dimiliki guna dapat mengembangkan Usaha Kecil Menengah.

Hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam meningkatkan unsur kultural dalam bidang pendidikan guna meningkatkan Usaha Kecil Menengah kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang pendidikan.

Hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam mengarahkan masyarakat secara struktural sesuai keterampilan yang dimiliki yaitu karena kurangnya keinginan masyarakat untuk mengikuti kegiatan Bimtek yang diberikan oleh Pemerintah Desa sesuai keterampilan yang dimiliki.

b. Penguatan

Hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam meningkatkan pengetahuan kaum perempuan dalam bidang teknologi untuk meningkatkan Usaha Kecil Menengah yaitu kurangnya pemahaman kaum perempuan dalam bidang teknologi, sehingga sulit untuk mengembangkan

Usaha Kecil Menengah yang ada, karena belum ada pelatihan dalam bidang teknologi.

Hambatan Pemerintah Desa dalam memperkuat kemampuan yang dimiliki kaum perempuan untuk meningkatkan Usaha Kecil Menengah yaitu, kemampuan dalam bidang usaha kurang terlatih sehingga kemampuannya tidak terasah, dikarenakan kurangnya keikutsertaan dalam pelatihan tentang Usaha Kecil Menengah maka dari itu kemampuan yang dimiliki tidak terasah.

Hambatan Pemerintah Desa dalam melakukan arahan untuk menunjang kemandirian kepada kaum perempuan yaitu, dikarenakan Kurangnya tingkat partisipasi dalam kegiatan Usaha Kecil Menengah, sehingga Usaha Kecil Menengah yang ada tidak berjalan.

c. Perlindungan

Hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam membuat aturan yang menunjukkan keberpihakan kepada kaum perempuan supaya tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dalam proses pengembangan Usaha Kecil Menengah yaitu kurangnya tingkat kepedulian kaum perempuan dalam penerapan aturan tentang pemberdayaan perempuan, sehingga adanya aturan pemberdayaan perempuan tidak berfungsi dengan baik.

Hambatan Pemerintah Desa dalam aturan yang berkaitan dengan hak-hak sosial kaum perempuan supaya tidak terjadi eksploitasi dalam proses pengembangan Usaha Kecil Menengah

yaitu belum ada musyawarah dan belum ada kajian mendalam tentang hak-hak sosial kaum perempuan supaya tidak terjadi eksploitasi, sehingga dalam melindungi masyarakat khususnya kaum perempuan kurang berjalan dengan baik.

Hambatan Pemerintah Desa dalam melakukan penghapusan jenis diskriminasi terhadap kaum perempuan yaitu kurangnya kemampuan kaum perempuan untuk mengembangkan Usaha Kecil Menengah, sehingga dengan adanya Usaha Kecil Menengah di desa padaherang tidak dikembangkan dengan baik.

d. Penyokongan

Hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam memberikan bimbingan keterampilan kepada kaum perempuan untuk meningkatkan Usaha Kecil Menengah yaitu kurangnya keikutsertaan kaum perempuan untuk mengikuti pelatihan dan pembinaan tentang Usaha Kecil Menengah.

Hambatan yang dihadapi dalam memberikan motivasi kepada kaum perempuan yaitu kurangnya kemauan kaum perempuan untuk mengembangkan motivasi yang telah diberikan oleh Pemerintah Desa.

Hambatan yang dihadapi dalam menyokong dengan memberikan bantuan kepada pelaku Usaha Kecil Menengah yaitu kurangnya kemampuan pelaku Usaha Kecil Menengah dalam pengelolaan bantuan berupa dana.

e. Pemeliharaan

Hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam menjamin keselarasan dan keseimbangan dalam meningkatkan Usaha Kecil Menengah yaitu kurangnya keinginan untuk meningkatkan Usaha Kecil Menengah.

Hambatan Pemerintah Desa dalam memelihara kondisi yang kondusif dalam pemeliharaan Usaha Kecil Menengah yaitu belum ada pemanfaatan teknologi, dalam pemasaran produknya. Karena kurangnya kepedulian masyarakat dalam pemeliharaan Usaha Kecil Menengah.

Hambatan Pemerintah Desa dalam memberikan kesempatan berusaha kepada kaum perempuan yaitu kurangnya keinginan kaum perempuan untuk mengembangkan kesempatan berusaha yang telah didukung oleh Pemerintah Desa yaitu kegiatan Usaha Kecil Menengah.

2. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Prinsip *Good Governance* di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian tentang hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Strategi Pemberdayaan Perempuan Oleh Pemerintah Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kegiatan Usaha Kecil Menengah di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang

Kabupaten Pangandaran dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pemungkinan

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Padaherang untuk mengatasi hambatan dilihat dari dimensi pemungkinan yaitu memberikan sosialisasi agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya kaum perempuan terhadap potensi ataupun keterampilan yang dimiliki, memberikan Bimtek sesuai keterampilannya supaya dapat mengembangkan Usaha Kecil Menengah, dan melakukan penyuluhan yang memberikan penyadaran akan pentingnya pendidikan terutama untuk meningkatkan Usaha Kecil Menengah, serta menyediakan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan yang memadai.

b. Penguatan

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Padaherang untuk mengatasi hambatan dilihat dari dimensi penguatan yaitu meningkatkan pengetahuan kaum perempuan terutama pelaku Usaha Kecil Menengah dalam bidang teknologi dengan cara pelatihan dan memberikan motivasi kepada kaum perempuan agar dapat mengembangkan kemampuannya, serta dengan diberikan pelatihan sesuai kemampuannya, hal itu dapat meningkatkan Usaha Kecil Menengah.

c. Perlindungan

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Padaherang untuk

mengatasi hambatan dilihat dari dimensi perlindungan yaitu memberikan sosialisasi dan himbauan kepada kaum perempuan supaya dapat menjalankan kegiatan yang telah didukung oleh Pemerintah Desa yaitu Usaha Kecil Menengah, melakukan musyawarah dengan pihak BPD untuk merumuskan aturan yang berkaitan dengan kaum perempuan, serta melakukan musyawarah untuk menguatkan penghapusan diskriminasi terhadap kaum perempuan.

d. Penyokongan

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Padaherang untuk mengatasi hambatan dilihat dari dimensi penyokongan yaitu mengajak dan mensosialisasikan kegiatan Usaha Kecil Menengah kepada kaum perempuan untuk mengikuti pelatihan dan pembinaan tentang Usaha Kecil Menengah supaya dapat meningkatkan Usaha Kecil Menengah, dan mengadakan pelatihan manajemen agar pelaku Usaha Kecil Menengah dapat mengelola bantuan dana yang diberikan, serta Pemerintah Desa berupaya meningkatkan akses pemasaran.

e. Pemeliharaan

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Padaherang untuk mengatasi hambatan dilihat dari dimensi pemeliharaan yaitu memberikan himbauan dan sosialisasi akan pentingnya kegiatan Usaha Kecil Menengah, agar mampu mencapai tingkat keselarasan yang baik pada kegiatan tersebut, dan meningkatkan

kesadaran kaum perempuan dengan memberikan pembinaan rutin sehingga tercipta kondisi yang kondusif dalam pemeliharaan Usaha Kecil Menengah, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia supaya dapat memelihara Usaha Kecil Menengah dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan oleh Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan kegiatan Usaha Kecil Menengah di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran sudah berjalan dengan optimal. Dari 15 indikator, 13 indikator sudah berjalan dan 2 indikator lainnya tidak berjalan.
2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan oleh Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan kegiatan Usaha Kecil Menengah di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap potensi dan keterampilan, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, kurangnya partisipasi dalam kegiatan Usaha Kecil Menengah, kurangnya tingkat kepedulian kaum perempuan dalam penerapan aturan tentang pemberdayaan perempuan, belum ada musyawarah mengenai aturan

yang mengacu pada hak-hak sosial kaum perempuan supaya tidak terjadi eksploitasi, kurangnya pemahaman tentang diskriminasi, kurangnya keikutsertaan untuk mengikuti pelatihan dan pembinaan, kurangnya kemampuan dalam mengelola bantuan dana, kurangnya kepedulian dalam pemeliharaan Usaha Kecil Menengah, serta kurangnya keinginan kaum perempuan untuk mengembangkan kesempatan berusaha dari Pemerintah Desa yaitu Usaha Kecil Menengah.

3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan oleh Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan kegiatan Usaha Kecil Menengah di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, yaitu memberikan sosialisasi dan bimtek sesuai potensi dan keterampilan, menyediakan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan yang memadai, meningkatkan kemampuan dalam bidang teknologi, memberikan motivasi berupa sosialisasi, melakukan musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk merumuskan aturan yang berkaitan dengan hak-hak sosial kaum perempuan, memberikan pemahaman mengenai diskriminasi kepada masyarakat khususnya kaum perempuan dan melakukan musyawarah untuk menguatkan penghapusan jenis diskriminasi

terhadap kaum perempuan, mengajak kaum perempuan untuk mengikuti pelatihan dan pembinaan tentang Usaha Kecil Menengah, mensosialisasikan kegiatan Usaha Kecil Menengah, memberikan pelatihan manajemen dan meningkatkan akses pemasaran, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pemeliharaan Usaha Kecil Menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung : Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2011. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Wilantara, Rio F, Susilawati. 2016. *Strategi & Kebijakan Pengembangan UMKM*. Bandung: PT. Refika Aditama.